

KEBIJAKAN INGGRIS TERHADAP MASALAH IMIGRAN UNI EROPA PASCA BREXIT TAHUN 2020

Oleh: Salsabila Khairu Nisa
Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA
Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28292
Telp/Fax. 076163277

ABSTRAK

Resminya Inggris menjadi anggota Uni Eropa mendapat beberapa kemudahan seperti penghilangan hambatan ekspor dan impor di Kawasan Eropa. Namun, disisi lain Uni Eropa yang menerapkan kebijakan *Free Movement of Person* yang mengakibatkan arus imigran Uni Eropa di Inggris menjadi tidak terkendali dan berpengaruh terhadap segala aspek di Inggris. oleh karena itu, Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa melalui Referendum Brexit pada tanggal 23 Juni 2016 dan menetapkan kebijakan imigran baru yaitu kebijakan berbasis point dan visa.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri oleh Cristopher Hill yang mengatakan bahwa kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh faktor eksternal dan faktor internal. Perspektif dalam penelitian ini adalah neorealisme. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan Keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa dan menerapkan kebijakan imigran berbasis point dan visa dikarenakan faktor eksternal yaitu 1) kebijakan *Free Movement of Person* Uni Eropa yang merugikan Inggris, 2) keberadaan imigran Uni Eropa di Inggris. Dan faktor internal yaitu 1) euroskeptism di dalam partai politik Inggris, 2) kampanye Brexit.

Kata Kunci: Imigrasi, Brexit, Uni Eropa, Inggris

ABSTRACT

The UK's official membership of the European Union has brought several benefits such as the removal of barriers to exports and imports in the European Region. However, on the other hand, the European Union implemented a Free Movement of Person policy which resulted in the flow of EU immigrants in the UK becoming uncontrollable and affecting all aspects of the UK. Therefore, the UK decided to leave EU membership through the Brexit Referendum on 23 June 2016 and set a new immigrant policy, namely point-based and visa policies.

This research uses the theory of foreign policy by Cristopher Hill which says foreign policy is influenced by external factors and internal factors. The perspective in this research is neorealism. The method used in this research is qualitative with literature study data collection techniques.

The results show that the UK's decision to leave the European Union and implement a point-based immigrant policy and visa is due to external factors, namely 1) the EU's Free Movement of Person policy which is detrimental to the UK, 2) the presence of EU immigrants in the UK. And internal factors, namely 1) euroskepticism within British political parties, 2) the Brexit campaign.

Keywords: Immigration, Brexit, European Union, UK

PENDAHULUAN

Inggris merupakan negara kesatuan yang letaknya di Eropa bagian Barat. Inggris merupakan negara maju yang sempat mengalami kemerosotan ekonomi akibat inflasi namun sejak bergabung dengan Uni Eropa kondisi perekonomian Inggris semakin kuat. Inggris tertarik bergabung dengan Uni Eropa dengan tujuan meningkatkan perekonomiannya. Inggris resmi menjadi keanggotaan Uni Eropa pada tanggal 22 Januari 1973.

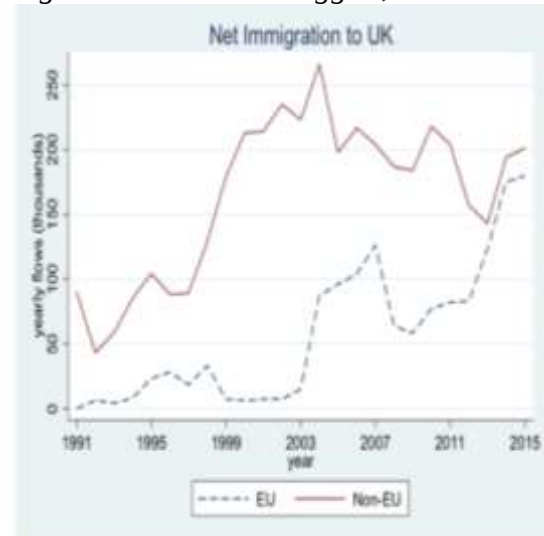
Uni Eropa yang dikenal dengan *European Economic Community* (EEC) merupakan organisasi regional yang bergerak dalam arena pasar bersama. *Daily Mail* memberikan deskripsi EEC sebagai suatu persatuan yang terdiri dari beberapa negara bebas yang memiliki tujuan bersama dan untuk menyatukan kekuatan perekonomian pasca perang.¹ Negara-negara pendiri *European Economic Community* (EEC) ialah Italia, Jerman Barat, Prancis, Luksemburg, dan Belgia.

Suatu organisasi memiliki kebijakan-kebijakan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggotanya. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan Uni Eropa ialah “*Open Door Immigration Policy*” yang dikeluarkan pada tahun 1973 guna para imigran bebas masuk dan tinggal di negara pilihannya. Kebijakan ini kemudian berkembang dengan mengedepankan 4 kebebasan fundamental salah satunya yaitu *Free Movement of Person* pada tahun 1993. Tujuan dari kebijakan *Free Movement of Person* untuk menaikkan perekonomian negara-negara Uni Eropa melalui mobilitasi tenaga kerja.

Meskipun kebijakan *Free Movement of Person* bertujuan atas dasar kemanusiaan dan kepentingan bersama, akan tetapi bisa menyebabkan Inggris menjadi tidak terkendali dalam menahan

arus imigrasi. Karena dengan kebijakan tersebut tak hanya berdampak pada membludaknya arus imigran yang masuk ke Inggris tetapi juga masuknya pasar tenaga kerja Eropa. Peningkatan imigran di Inggris ditandai dengan bergabungnya negara-negara A8 yang berasal dari Eropa Timur menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004. Negara-negara A8 yaitu Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Slovakia, dan Slovenia.²

Imigrasi Bersih ke Inggris, 1991-2015



Sumber: CEP analysis of ONS (2016) <https://www.ons.gov.uk/>

Setelah 47 tahun akhirnya Inggris memutuskan untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa melalui referendum. Hal ini karena keberadaan imigran yang mengancam dan memunculkan sikap skeptis dari masyarakat Inggris. Referendum yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 dikenal dengan istilah “Brexit” bermakna Britain Exit tersebut menjadikan Inggris menjadi dua kubu yaitu pendukung Brexit dan yang memilih tetap bergabung di Uni Eropa. Sebanyak 72,2 % partisipasi menunjukkan

¹ Darwis Danial dan Theyana Howay, 2021, “Keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa dan implikasinya bagi perekonomian”, Jurnal Politik dan Pemerintahan, vol.1 No.2, hlm.70.

² Office For National Statistics. “Migration Statistics Quarterly Report : February 2016”, <https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/february2016#net-migration-to-the-uk>, diakses pada 27 Februari 2023.

hasil bahwa pendukung Brexit lebih unggul dengan perolehan suara 51,9%. Sedangkan yang memilih tetap bergabung di Uni Eropa memperoleh suara 48,1%.³ Setelah melalui perjalanan yang Panjang melalui proses negosiasi Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020.

Resminya Inggris meninggalkan Uni Eropa yang artinya Inggris dapat mewujudkan kebijakan-kebijakan baru. Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah imigran Uni Eropa mulai diberlakukan. Kebijakan tersebut ialah sistem imigrasi berbasis point dan juga visa. Sistem tersebut mulai berlaku pada 1 Januari 2020.⁴

Kebijakan sistem berbasis point dan juga visa merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Inggris untuk mengurangi para pekerja imigran yang berasal dari Uni Eropa. Kebijakan ini secara substansial dan membatasi warga negara Uni Eropa, yang sebelumnya menikmati hak-hak kebebasan bergerak, dan karena itu dapat dengan bebas pindah ke Inggris untuk tinggal, bekerja, atau belajar. Warga negara Uni Eropa, termasuk pekerja terampil, kini memerlukan visa untuk tinggal atau bekerja di Inggris, dan harus membayar biaya yang cukup besar. Pada sistem ini individu yang ingin bekerja di Inggris harus memiliki visa Skill Worker dengan melalui jalur yang diuji dengan poin, membutuhkan tawaran pekerjaan, dan pelamar harus melakukan pekerjaan spesifik yang disponsori (pemberi kerja)

KERANGKA TEORI

Perspektif Neorealisme

Perspektif neorealisme atau realisme structural yang diperkenalkan oleh Kenneth Waltz pada tahun 1979 dalam karyanya yang berjudul *Theory of*

³ I Dewa Gede Prastha Pratama Putra dkk, "Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa Di Inggris", hlm 2.

⁴ Gov.Uk, 2020, "New immigration system: what you need to know", hlm.2.

International Politics. Teori ini merupakan pengembangan dari teori realisme keduanya memiliki nilai yang sama bahwa hubungan antar negara selalu bersifat bertentangan. Neorealisme berpandangan bahwa dalam tatanan dunia, sistem global yang dapat mempengaruhi aktor baik individu maupun negara.⁵

Neorealisme percaya dalam sistem anarki tidak ada pemimpin tertinggi di dunia. Negara tetap menjadi aktor utama dalam segala tindakan dengan mengutamakan prinsip "*Self Help*" negara berupaya untuk bertahan hidup. Neorealisme tidak mementingkan masalah yang dihadapi oleh aktor tersebut, melainkan bagaimana kemampuan aktor dalam menghadapi masalah tersebut. kemampuan aktor penting untuk memutuskan posisi dalam sistem global.⁶

Tingkat Analisa Negara Bangsa

Salah satu hal penting dalam penelitian ialah menentukan level analisa guna memperdalam objek permasalahan pada penelitian yang kita tulis. Dalam hal ini Mohtar Mas'ood menjelaskan terdapat 5 level analisa dalam hubungan internasional, diantaranya perilaku individu, perilaku kelompok, negara-bangsa, dan sistem internasional.⁷

Peneliti menggunakan level analisa negara-bangsa dalam penelitian ini. Level analisa negara bangsa menjelaskan bagaimana terdapat aktor negara yaitu kelompok kepentingan, badan legislative, dan birokrat sebagai penentu kebijakan luar negeri untuk menyelesaikan permasalahan internal negara.

⁵ Robert Jackson and Georg Sorensen, 2014, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hlm. 165.

⁶ ibid

⁷ Mas'ood, Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi*, PT.Pustaka LP3ES Indonesia : Jakarta.

Teori Kebijakan Luar Negeri

George Modelski mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai sistem yang dikeluarkan oleh negara mempengaruhi negara lain juga membangun kepentingan negara di lingkungan internasional.⁸ Pendapat lain seperti Christopher Hill yang mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai penggabungan dari politik domestik dan politik internasional. Oleh karena itu, kebijakan luar negeri memiliki dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.⁹

Faktor eksternal berasal dari hukum internasional, organisasi internasional, sekutu, dan kekuatan militer. Faktor eksternal berkaitan dengan keadaan yang ada di luar wilayah negara tersebut. Negara menjalin hubungan dengan negara lain baik secara bilateral, trilateral, regional, dan multilateral juga adanya keikutsertaan organisasi internasional yang bisa berdampak pada pembuatan kebijakan. Organisasi dapat mengharuskan sebuah negara untuk dapat mematuhi kebijakan tertentu dan juga menerapkan aturan-aturan organisasi agar tercapainya tujuan organisasi tersebut.

Sedangkan faktor internal berasal dari kultur negara, situasi ekonomi, opini public, dan politik dalam negeri. Faktor internal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri berasal dari negara itu sendiri. Dalam hal ini situasi ekonomi menjadi penting karena negara sangat bergantung terhadap keadaan ekonomi dalam menjalankan pemerintahannya.

Konsep Keamanan Nasional

Keamanan nasional memiliki 2 sudut pandang yaitu tradisional dan non-tradisional. Dalam pandangan tradisional konsep keamanan nasional menjadikan negara sebagai aktor utama. Waltz

mengatakan konsep keamanan dipelajari untuk mengetahui ancaman, penggunaan, dan kontrol terhadap militer. Bagi tradisional konsep keamanan berkaitan dengan militer. Negara dapat terancam akibat terjadinya penyalahgunaan kekuatan militer.

Konsep keamanan mengalami perkembangan sehingga munculah konsep keamanan non-tradisional. Keamanan non-tradisional tidak berkaitan dengan militer melainkan isu lain seperti, lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial. Tidak hanya ancaman militer tetapi isu-isu lingkungan, politik, ekonomi, dan sosial juga dapat mengancam keamanan suatu negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif adalah metode atau cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam sebuah penelitian yang berkaitan dengan data berupa penjelasan ataupun narasi. Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang dibahas di penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Teknik kepustakaan yaitu pengumpulan data-data yang diperoleh dari studi Pustaka termasuk di dalamnya literatur, seperti; buku, karya tulis ilmiah, jurnal, surat kabar, serta dokumen-dokumen terkait dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Free Movement of Person

Seiring dengan berjalannya waktu Uni Eropa berniat untuk memperluas jangkauan ekonominya. Schengen Agreement dibentuk tahun 1985 untuk memudahkan pergerakan tanpa membutuhkan dokumen resmi berkembang dan menjadi cikal bakal terbentuknya pergerakan bebas orang karena tujuannya agar pergerakan orang dan jasa dapat dipermudah. Pergerakan bebas orang dan jasa diperkuat dengan

⁸ Bojang, 2018, *"The Study of Foreign Policy in International Relations"*. Journal of Politican Sciences and Public, vol.6 No.4.

⁹ Charles F Hermann, 1990, *Changing Course: When Governments Choose to Redirect Foreign Policy*, Ohio. International Studies Quaterly.

dikeluarkan dalam Lisbon Treaty (2009) yang melindungi konsep kewarganegaraan Uni Eropa bahwa tiap warga negara Uni Eropa berhak untuk bergerak atau berpindah dan bebas diwilayah negara anggota.

Pergerakan bebas orang juga termasuk dalam 4 kebebasan fundamental dalam pasar tunggal/pasar internal. Kebebasan fundamental bertujuan untuk menghilangkan hambatan perbatasan dengan dihapusnya tarif dan non-tarif yang menjamin hak kebebasan bergerak orang, barang, jasa, arus, dan modal sehingga terpenuhinya efisiensi pasar.¹⁰ hal ini menguntungkan bagi Single Market karena adanya dukungan pengembangan tenaga kerja Uni Eropa dimana para pekerja dapat bergerak bebas di Uni Eropa untuk memenuhi kebutuhan pekerja terampil (Skill Worker) dan menurunkan ketimpangan lapangan pekerjaan, dan menaikkan kesempatan ekonomi bagi negara anggota.

Pergerakan bebas orang membuat Inggris tidak terkendali dalam arus orang yang masuk ke Inggris. Kebijakan tersebut berdampak pada jumlah kenaikan yang terus menerus meningkat setiap tahunnya. Lembaga Statistik Nasional Inggris melampirkan data terjadi peningkatan imigran di Inggris ditandai dengan bergabungnya negara-negara A8 yang berasal dari Eropa Timur menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 2004.

Negara-negara A8 yaitu Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Latvia, Lituania, Polandia, Slovakia, dan Slovenia. Pada tahun 2015 imigrasi bersih Uni Eropa adalah 172.000 (terdiri dari 257.000 yang datang dan 85.000 yang pergi). Negara-negara Uni Eropa sekarang menyumbang 35% dari semua imigran yang tinggal di Inggris. Sementara 29% warga negara Uni Eropa adalah Polandia dan 12% Irlandia, imigran Uni Eropa lainnya tersebar cukup

merata di 25 negara lainnya di Uni Eropa.¹¹

Referendum Brexit

Hubungan antara Inggris dan Uni Eropa tidak berjalan dengan baik. Ketidakepahahaman sering terjadi karena Uni Eropa mengeluarkan kebijakan yang merugikan Inggris terutama masalah imigran. Selama Inggris bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa, Inggris sudah dua kali mengajukan referendum. Referendum yang diajukan Inggris berisi tentang apakah Inggris tetap menjadi bagian dari Uni Eropa atau meninggalkan Uni Eropa.

Referendum pertama pada tahun 1975 dengan hasil mayoritas rakyat Inggris memilih untuk tetap menjadi bagian Uni Eropa. Referendum kedua yang dilaksanakan pada 23 Juni 2016 dikenal dengan istilah "Brexit" bermakna Britain Exit.

Sebanyak 72,2 % partisipasi menunjukkan hasil bahwa pendukung Brexit lebih unggul dengan perolehan suara 51,9%. Sedangkan yang memilih tetap bergabung di Uni Eropa memperoleh suara 48,2%. Hasil referendum tersebut menandakan bahwa sudah menjadi keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.¹²

Setelah melalui perjalanan yang Panjang melalui proses negosiasi Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa pada tanggal 31 Januari 2020. Dengan keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa itu berarti keadaan baru Inggris dapat mengatur sendiri kebijakan nasionalnya mengenai ekonomi, politik, dan kontrol atas imigrasi.¹³

¹⁰ HM Government, 2014, "Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union, Single Market: Free Movement of Persons", Crown, London, hlm.13.

¹¹ Jonathan Wadsworth et al., "Brexit and the Impact of Immigration on the UK," The London School of Economics and Political Science, 2016, hlm.3.

¹² I Dewa Gede dkk, Loc.Cit.

¹³ Ade Priangani, 2017, "Efek Brexit terhadap Perekonomian Global", Jurnal Westphalia, Vol. 16 No.1, ISSN: 0853 – 2265, hlm.2.

Kebijakan Imigran Uni Eropa Pasca Brexit

Setelah Brexit, sistem baru untuk migrasi kerja ditetapkan. Sistem ini memprioritaskan pekerjaan terampil dengan pengecualian terbatas untuk pekerja sosial dan pekerja musiman. Sistem imigrasi “berbasis poin” pasca-Brexit mengharuskan warga negara Uni Eropa untuk mengajukan visa dengan cara yang sama seperti warga negara dari seluruh dunia.

Pemberlakuan sistem ini mulai 1 Januari 2021. Prinsip-prinsip sistem berbasis point adalah (1) lebih adil, karena kami menerima orang berdasarkan keterampilan yang mereka tawarkan dan bagaimana mereka akan berkontribusi untuk Inggris, bukan dari mana paspor mereka berasal, (2) lebih tegas, karena kami memiliki kendali atas perbatasan kami sendiri dan dapat memutuskan siapa yang masuk ke negara ini, (3) berbasis keterampilan, karena kami memiliki akses ke keterampilan yang dibutuhkan ekonomi kami, dengan orang-orang.¹⁴

Di bawah sistem berbasis point permohonan visa dibagi menjadi 5 tingkatan. Setiap tingkatan memiliki kondisi, hak, dan persyaratan masuk yang berbeda bagi orang yang ingin tinggal dan bekerja di Inggris dan setiap tingkatan mengharuskan pekerja untuk mengalokasikan jumlah poin yang cukup untuk mendapatkan izin masuk atau izin tinggal di Inggris. Poin dialokasikan sesuai dengan sifat-sifat, seperti usia, kualifikasi, penghasilan, bahasa, dan dana, dengan jumlah poin yang berbeda yang diperlukan untuk masing-masing dari lima tingkatan.¹⁵

A. Visa Tingkat 1

¹⁴ UK. Parliament, 2021, “UK Visa and Immigration Policies for EU and EEA Citizens”, diakses dari : (<https://lordslibrary.parliament.uk/uk-visa-and-immigration-policies-for-eu-and-eea-citizens/>), pada tanggal 13 Januari 2024.

¹⁵ Visa Guide, “UK Immigration Points Based System”, diakses dari : (<https://visaguide.world/europe/uk-visa/point-based-system/>), pada tanggal 20 Februari 2023.

Visa ini diperuntukkan individu berketerampilan tinggi, pengusaha, investor, dan mahasiswa pascasarjana dari Uni Eropa dan Wilayah luar Uni Eropa yang akan menawarkan produktivitas dan pertumbuhan di Inggris. Kandidat tidak memerlukan tawaran pekerjaan untuk memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan, tetapi harus lulus penilaian berbasis poin sebanyak 95 poin, dengan 75 poin wajib terpenuhi. poin-poin tersebut dinilai berdasarkan umur, gelar sarjana, pendapatan, mahir berbahasa Inggris, dan tambahan lainnya.

B. Visa Tingkat 2

Visa tingkat ini merupakan pekerja terampil menengah. Permohonan bekerja harus memenuhi 70 poin untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan visa. Semua pelamar, baik warga negara Uni Eropa maupun non Uni Eropa harus menunjukkan bahwa mereka memiliki tawaran pekerjaan dari sponsor yang disetujui. Sponsor tersebut adalah Home Office.

Tawaran pekerjaan harus sesuai dengan Tingkat keahlian yang dibutuhkan, pekerjaan yang sesuai dengan kriteria Skill Worker bisa di cek melalui kode yang dibuat oleh pemerintah Inggris (dibutuhkan pada Tingkat RQF3 Regulated Qualifications Framework). Pekerja mampu berbahasa Inggris menjadi hal wajib yang harus dipenuhi untuk mengisi point, tes yang dilakukan harus setara dengan level b1 atau yang lebih tinggi untuk pekerjaan tertentu.

C. Visa Tingkat 3

Kategori ini dirancang untuk pekerja berketerampilan rendah yang mengisi kekurangan tenaga kerja sementara di Inggris. Namun setelah sistem ini mulai beroperasi, pemerintah Inggris memutuskan tidak perlu lagi menerima imigrasi tidak terampil dari luar Uni Eropa. Di bawah koalisi, hal ini telah dihapus.

D. Visa Tingkat 4

Kategori ini diperuntukkan bagi siswa berusia di atas 16 tahun yang ingin belajar

di Inggris, baik di sekolah, perguruan tinggi, atau universitas. Pelamar harus memiliki tempat di lembaga pendidikan Inggris yang terdaftar sebelum dapat mendaftar. Visa Pelajar Anak, berlaku untuk anak-anak berusia antara 4 - 16 tahun yang ingin datang ke Inggris dan bersekolah di sekolah independen untuk melanjutkan pendidikan.

Visa Pelajar, untuk menempuh pendidikan setelah usia 16 tahun di Inggris. Poin yang dialokasikan untuk Visa dalam kategori Tingkat 4, siswa harus mendapatkan 40 poin yang dinilai berdasarkan lembaga pendidikan dan pemeliharaan

E. Visa Tingkat 5

Kategori ini terdiri dari enam kategori pekerja sementara, termasuk pekerja kreatif dan olahraga, pekerja amal, pekerja keagamaan, dan skema mobilitas pemuda yang memungkinkan sekitar 55.000 anak muda setiap tahun untuk bekerja di Inggris pada hari libur. Visa ini diberikan kepada kaum muda dari negara-negara yang memiliki perjanjian timbal balik dengan Inggris. Visa Tingkat 5 memiliki 2 kategori yaitu Skema Mobilitas Pemuda dan Pekerja sementara.

Skema Mobilitas Pemuda harus memenuhi 50 poin yang dinilai berdasarkan kewarganegaraan, usia, dan finansial. Pekerja sementara membutuhkan 40 poin yang dinilai berdasarkan sertifikat sponsor dan pemeliharaan. Bagi warga Uni Eropa yang telah tinggal di Inggris sebelum terjadinya pembatasan pergerakan bebas maka wajib melaporkan pada Skema Penyelesaian Uni Eropa sampai batas waktu 30 Juni 2021.

Hal ini agar warga negara Uni Eropa yang tinggal di Inggris dapat memperoleh status imigrasi pra-mukim atau menetap yang mereka perlukan untuk terus tinggal, bekerja, dan belajar.¹⁶ Peraturan Imigrasi menetapkan daftar aktivitas yang diizinkan bagi pengunjung. Misalnya, mereka dapat

mengunjungi teman dan keluarga, datang ke Inggris untuk berlibur, menjadi sukarelawan hingga 30 hari dengan badan amal yang terdaftar, atau belajar hingga enam bulan di lembaga terakreditasi yang bukan sekolah atau akademi yang didanai negara

Pengunjung diizinkan untuk melakukan beberapa kegiatan bisnis umum, termasuk: menghadiri rapat, konferensi, seminar, dan wawancara; memberikan ceramah atau pidato non-komersial; bernegosiasi dan menandatangani kesepakatan dan kontrak; menghadiri pameran dagang untuk tujuan promosi (tetapi tidak menjual secara langsung); melakukan kunjungan dan inspeksi lapangan; mengumpulkan informasi untuk pekerjaan mereka di luar negeri; dan mendapatkan pengarahannya tentang persyaratan pekerja yang berbasis di Inggris, selama pekerjaan apa pun untuk pekerja tersebut dilakukan di luar Inggris. Namun, tanpa visa, pengunjung bisnis tidak dapat melakukan pekerjaan yang dibayar atau sebagai wiraswasta, melakukan penempatan kerja atau magang, menjual secara langsung kepada publik atau menyediakan barang dan jasa.

Faktor Eksternal Inggris Mengeluarkan Kebijakan Berbasis Point dan Visa.

1. Kebijakan Free Movement of Person Merugikan Inggris

Pengaruh Uni Eropa yang begitu besar menyebabkan Inggris tidak dapat mengatur sendiri wilayah internalnya karena harus mentransaksikan kepentingan Eropa secara menyeluruh. Kepentingan-kepentingan Uni Eropa yang direalisasikan dalam bentuk kebijakan membuat negara anggota harus turut serta dalam kebijakan tersebut. walaupun negara menyerahkan kewenangannya kepada organisasi, negara tetap memiliki kewenangan tertinggi dan mandiri dalam mengatur masyarakat dan wilayahnya. Uni Eropa terlalu melakukan intervensi yang bertentangan dengan kedaulatan Inggris baik keamanan,

¹⁶ HM Government, 2022, "New Plan For Immigration: Legal Migration and order Control" Strategy Statement, hlm.9.

kebijakan nasional, kebijakan luar negeri, hingga penerimaan imigran.

Keputusan Inggris keluar dari Uni Eropa karena kebijakan Free Movement of Person yang terdapat dalam 4 Kebebasan Fundamental dalam pembentukan pasar tunggal yang terlalu ramah kepada imigran terutama imigran pekerja dari negara anggota Uni Eropa. Inggris terpaksa membuka pintu dan keamanan perbatasannya dan menerima imigran untuk masuk dan menetap di negaranya.¹⁷

Adanya kebijakan Free Movement of Person menyebabkan arus masuk orang menjadi tidak seimbang dimana perpindahan terjadi dari orang yang berasal dari negara miskin ke negara kaya.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk bekerja di negara tujuan dan memperbaiki kondisi perekonomian mereka. Ditambah lagi jangkauan integrasi Uni Eropa yang begitu besar pada tahun 2004 dimana negara-negara A8 menyumbang tenaga kerja Uni Eropa datang ke Inggris.

Permasalahan lain yang datang adalah pergerakan tenaga kerja menerima hak yang tidak seharusnya. Tenaga kerja Uni Eropa memanfaatkan pergerakan bebas orang untuk menikmati hak tersebut dengan bebas berpindah dan menjadi tanggungan negara tempat mereka tinggal.

2. Keberadaan Imigran Uni Eropa di Inggris

Akibat kebijakan Free Movement of Person yang mengantarkan arus pekerja imigran Uni Eropa datang ke Inggris mengancam segala aspek kehidupan internal di Inggris menjadi terganggu. Mulai dari ekonomi, budaya, persaingan tenaga kerja, dan keamanan di Inggris. Sejak bergabungnya Inggris menjadi keanggotaan Uni Eropa tidak hanya

kemajuan yang dihasilkan tetapi kerugian yang berakibat pada meningkatnya beban ekonomi. Peningkatan tersebut salah satunya muncul dari keberadaan imigran Uni Eropa di Inggris.

Permasalahan tersebut berdampak pada beban yang ditanggung oleh pemerintah Inggris menjadi meningkat. Tercatat bahwa migran pada tahun 2009-2010 turut serta mengonsumsi pelayanan publik yang disediakan oleh Inggris meliputi tunjangan terhadap anak, disabilitas, pekerja, kesehatan.¹⁹ Keberadaan imigran memicu ketegangan antara masyarakat lokal dengan imigran yang masuk. Hal ini dikarenakan para imigran yang membawa ideologi, budaya, dan agama yang berbeda dengan negara Inggris sehingga menjadi ancaman bagi masyarakat lokal. Perbedaan juga memicu terbentuknya kelompok-kelompok minoritas.

Peningkatan imigran pekerja di Inggris terjadi saat negara A8 pada tahun 2004 yang berasal dari Eropa Timur bergabung menjadi keanggotaan Uni Eropa. Dari tahun 2004 hingga 2014 perkembangan arus imigran semakin meningkat yang berasal dari Eropa Timur sebagai negara pemasok imigran dan Eropa Barat sebagai negara penerima Imigran. Hal ini berdampak pada pekerja asli Inggris perlu berkompetisi dengan para pekerja imigran yang datang.²⁰

Walaupun kondisi ini saling menguntungkan karena pekerja imigran yang memiliki keterampilan tinggi dan mau dibayar rendah akan masuk ke Inggris, akan tetapi menciptakan kesenjangan dan pengangguran. Dimana para pekerja imigran dapat mengisi pekerjaan pekerja lokal di Inggris dan mau

¹⁷ Ledi Sanita Tobing, 2019, “*Hubungan Diplomasi Keamanan Inggris dan Uni Eropa (UE) Pasca Pernyataan Referendum British Exit Tahun 2016 - 2017*”, JOM FISIP, Vol. 6 Edisi II Juli – Desember 2019, hlm.4.

¹⁸ Alex Glennie dan Jennie Pennington, 2014, “*Europe, Free Movement and the UK – Charting a New Course*”. IPPR, London, hlm.14.

¹⁹ House of Commons, 2016, “*Migration Crisis*”, diakses dari : <https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/24/2412.htm>, pada tanggal 11 April 2024.

²⁰ Ken Clark, Steppen Drinkwater, dan Catherine Robinson, 2014, “*Migration, Economic Crisis and Adjustment in the UK*”, iza Discussion Paper, No.8410, hlm.4.

dibayar murah sehingga pekerja lokal menjadi pengangguran.²¹

Keberadaan imigran Uni Eropa juga mengancam keamanan nasional negara Inggris. badan kepolisian informasi catatan criminal Inggris (ACRO) yang bekerja sama dengan UKCA-ECR lembaga Inggris dan Uni Eropa yang memuat sistem pertukaran informasi data pada tahun 2014 menyebutkan sekitar 11.313 warga negara Uni Eropa melakukan kejahatan seperti pembunuhan dan kekerasan seksual.²²

Imigran Uni Eropa juga melakukan penipuan tentang penyalahgunaan hak pergerakan bebas dengan memanfaatkan tunjangan kesejahteraan Inggris. tindakan ini telah dilaporkan kepada komisi Eropa dan dipublikasikan Home Office Inggris pada tahun 2013. Penipuan yang dilakukan oleh jaringan criminal Polandia dengan menjanjikan 200 calon pekerja dapat bekerja di Inggris dengan melakukan penandatanganan pembuatan rekening bank. Hal ini bertujuan agar penipu dapat mengklaim tunjangan kesejahteraan. Keuntungan yang didapat penipu sekitar 2,9 juta Poundsterling yang berakibat Inggris mengalami kerugian.²³

Faktor Internal Inggris Mengeluarkan Kebijakan Berbasis Point dan Visa

1. Euroskeptism di Dalam Partai Politik Inggris

Kondisi politik domestic Inggris terbentuk dari kelompok yang mendukung Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa dengan mendorong pelaksanaan

referendum. Kelompok ini juga disebut sebagai euroskeptisme yaitu kelompok anti Eropa. Kelompok euroskeptism ini berasal dari kalangan partai politik Inggris. Euroskeptism di partai politik terjadi karena ketidaksepahaman terhadap prinsip yang terjadi antara Inggris dengan Uni Eropa menciptakan kondisi dimana partai politik Inggris menganggap bahwa negara harus menarik diri dari keanggotaan Uni Eropa.²⁴

Istilah euroskeptism mulai populer tahun 1980-an yang ditandai dengan perubahan sikap pada Partai Konservatif dan Partai Buruh terhadap Uni Eropa. Pada awalnya dukungan terhadap Uni Eropa oleh Perdana Menteri saat itu Margareth Thatcher (1979-1990) yang menandatangani *Single European Act* tahun 1986 dan keberpihakan terhadap Uni Eropa pada referendum tahun 1975, namun berubah setelah pada tahun 1988 menyatakan pidato euroskeptism yang dikenal sebagai *Bruges Speech of 1988* pidato tersebut tidak bermaksud bahwa Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa tetapi untuk membatasi ambisi Uni Eropa.²⁵ Karena sikap Margareth Thatcher dalam pidatonya membuka jalan euroskeptism bagi Partai Konservatif.²⁶

Pada tahun 2010-2015 terdapat empat partai utama Inggris yang memiliki pandangan yang berbeda terkait Uni Eropa: (1) Partai Konservatif menolak integrasi Inggris-Uni Eropa lebih jauh dan menolak kesepakatan Lisbon pada tahun 2007, (2) Partai Buruh mendukung pembaruan perjanjian Amsterdam dan mendorong perluasan Uni Eropa kebagian Timur, (3) Partai Liberal Demokrat menyetujui perjanjian Lisbon namun

²¹ European Parliament, 2018, “*The Labour Market Situation Recent in Impact Recent of Third Country Migrants*”, hlm.6.

²² Acro Criminal Record Office, 2015, “*Annual Report 2014-2015*”, diakses dari : [https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version\(1\).pdf](https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version(1).pdf), pada tanggal 25 April 2024.

²³ Tim Ross, 2014, “*Revealed: Home Office Dossier on Abuse and Fraud By Eu Migrants*”, diakses dari : <https://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/10597409/Home-Office-hid-dossier-on-EU-migrants.html>, pada tanggal 26 April 2024.

²⁴ Aleks Szczerbiak and Paul Taggart. 2003. ‘*Theorising Party-Based Euroscepticism: Problem of Definition, Measurement and Causality*’, SEI Working Paper No 69, hlm.6.

²⁵ Toby Helm, 2016, “*British Euroskeptism: A Brief History*”, diakses dari : <https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/07/british-euroscepticism-a-brief-history>, pada tanggal 19 Juni 2024.

²⁶ ibid

memprotes adanya perubahan kelembagaan yang lebih jauh dan mementingkan subsidiaritas, (4) United Kingdom Independent Party sangat mendukung Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Hal ini dikarenakan Inggris harus mengeluarkan biaya lebih dalam keanggotaan Uni Eropa

Partai politik anti Eropa juga mendorong dikeluarkannya referendum apakah Inggris tetap menjadi bagian Uni Eropa atau keluar dari Uni Eropa.²⁷ Referendum Brexit terlaksana pada tanggal 23 Juni 2016 yang hasilnya kelompok pendukung Inggris keluar dari Uni Eropa lebih unggul dan Inggris resmi meninggalkan Uni Eropa pada 31 Januari 2020.

2. Kampanye Brexit

Sebelum pelaksanaan referendum Brexit pada 23 Juni 2016 terdapat kampanye yang mempengaruhi hasil referendum Brexit. Gerakan kampanye yang melibatkan pemimpin partai politik dan pejabat publik untuk mempengaruhi pemilih agar Inggris keluar dari keanggotaan Uni Eropa melalui peran Partai Konservatif dan United Kingdom Independence Party (UKIP). Hal ini disampaikan oleh pemimpin UKIP Nigel Farage pada masa kampanye mengatakan Uni Eropa telah gagal menangani kasus imigrasi dan keamanan.²⁸

Selain UKIP keterlibatan Partai Konservatif yang didukung oleh Boris Johnson selaku walikota London (2008-2016), Michael Gove Menteri Pertahanan dan beberapa kabinet David Cameron yaitu John Whittingdale Menteri kebudayaan, Duncan Smith Menteri Dalam Negeri, Theresa Villiers Menteri Irlandia Utara, Priti Patel Menteri ketenagakerjaan, dan

Andrea Leadsom Menteri Energi.²⁹ juga menyampaikan pengaruhnya untuk mendukung keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa karena apabila Inggris tetap menjadi bagian Uni Eropa maka tidak memiliki kewenangan dalam menyelesaikan masalah tersebut

Peran media massa yang mempengaruhi pandangan masyarakat untuk menentukan pilihan pada referendum. Media massa yang berpihak dalam mengkampanyekan Inggris keluar dari Uni Eropa adalah The Daily Express yang menunjukkan data bahwa 75% artikelnya berisi kampanye penolakan Uni Eropa, dan hanya 5 % yang mendukung Inggris tetap di Uni Eropa. selain itu, The Daily Mail dengan komposisi 61% disbanding 14% antara artikel yang mendukung tetap menjadi anggota Uni Eropa. mayoritas artikel berita tersebut berisi dukungan terhadap kelompok yang menolak Uni Eropa. isi dari pemberitaan media tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan imigrasi.³⁰

Latar belakang pemilih Inggris yang memberikan ruang bagi dukungan kelompok yang menolak Inggris tetap berada di Uni Eropa yaitu berasal dari pendukung UKIP, pemilih yang belum sarjana, Tingkat kesejahteraan seperti masyarakat pekerja kasar, pengangguran dan pensiun memilih keluar dari Uni Eropa.³¹

Mengangkat 3 isu utama yang menggiring opini publik Inggris dan menjadi perhatian dari masyarakat. Pertama Isu ekonomi bahwa Inggris lebih

²⁷ ibid

²⁸ Mason, Stewart, and Asthana, 2016, "Boris Johnson Insist Immigration Pledge is not Bid to Oust Cameron" The Guardian, diakses dari : (<https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/01/boris-johnson-insists-not-presenting-post-cameron-government-vote-leave>), pada tanggal 26 April 2024.

²⁹ Nadia Fairuza Azzahra, 2017, "Alasan Masyarakat Inggris Memilih Keluar Dari Keanggotaan Uni Eropa Pada Referendum Tahun 2016", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

³⁰ Levy, Aslan, dan Birony, 2016, "The Press and the Referendum campaign," Dalam Eu Referendum Analysis 2016: Media, Voters, and the Campaign, England The Centre for the Study of Journalism, Culture and Community. Bournemouth University, hlm.33.

³¹ Elise Uberoi, 2016, "European Union Referendum 2016". House of Commons Library, hlm.19-20

makmur apabila keluar dari Uni Eropa. Isu kedua tentang imigran dan menolak perluasan Uni Eropa dalam menerima keanggotaan negara. Serta keberadaan imigran berpengaruh terhadap aspek budaya, persaingan pekerja dan keamanan di Inggris. Ketiga isu National Health Service kelompok penolak meyakini kerugian besar Inggris karena harus mengeluarkan 350 juta Poundsterling untuk keanggotaan Uni Eropa.³²

KESIMPULAN

Kebijakan Free Movement of Person memberikan dampak negative bagi Inggris karena arus imigran di Inggris menjadi tidak terkendali. Terutama imigran pekerja pada saat negara Eropa Timur (A8) bergabung dalam keanggotaan Uni Eropa. Kondisi tersebut mengharuskan Inggris melaksanakan referendum atas permintaan masyarakat Inggris yang memandang negative imigran Uni Eropa. Referendum dilaksanakan pada 23 Juni 2016 yang dipelopori oleh David Cameron. Hasil dari referendum tersebut adalah pendukung Inggris keluar dari Uni Eropa lebih Unggul.

Resminya Inggris keluar dari Uni Eropa pada 31 Januari 2020 menandakan bahwa Inggris sudah tidak terikat lagi kebijakan lama dan mampu mewujudkan kebijakan baru. Aturan baru mengharuskan imigran memiliki visa dengan memenuhi beberapa point dan diperuntukkan bagi pekerja yang memiliki skill. Visa dikategorikan dalam 5 tingkatan, (1) visa Tingkat 1 untuk pengusaha, investor, dan pascasarjana yang memenuhi 95 point; (2) visa Tingkat 2 untuk pekerja menengah terampil yang memenuhi 75 point; (3) visa Tingkat 3 untuk berketerampilan rendah tetapi sudah tidak berlaku; (4) visa Tingkat 4 untuk pelajar memenuhi 40 point; (5)

visa Tingkat 5 untuk pekerja sementara memenuhi 40 point. Masing-masing tingkatan harus memenuhi beberapa point agar mendapatkan visa. peraturan masuknya imigran Uni Eropa di Inggris juga diberlakukan tanpa visa bagi yang mengunjungi keluarga, teman, berlibur, dan menjadi sukarelawan selama 30 hari.

Inggris menetapkan kebijakan baru terhadap imigran karena terdapat faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal berasal dari kebijakan Uni Eropa terkait imigran. Uni Eropa sebagai organisasi mengeluarkan kebijakan yang merugikan Inggris. keberadaan imigran juga berpengaruh terhadap segala aspek di Inggris seperti beban ekonomi bertambah, terkikisnya budaya Inggris, persaingan tenaga kerja, dan masalah keamanan. Kebijakan Free Movement of Person yang memberikan kemudahan masuknya Imigran pekerja Uni Eropa mengancam kondisi internal negara Inggris.

Faktor internal berasal dari Inggris sendiri yaitu dinamika politik domestik. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaruh dari Euroskeptism (anti Eropa) partai-partai politik di Inggris seperti yang termasuk dalam partai utama Inggris yaitu Partai Konservatif dan UKIP. Selama referendum Brexit terjadi banyak kampanye yang dilakukan. Kampanye tersebut berasal dari tokoh politik yang menyuarakan dukungan Inggris keluar dari Uni Eropa. Selain itu, peran media massa juga berpengaruh, dengan memberitakan dukungan terhadap keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Serta menggiring opini publik dengan mengangkat 3 isu utama, ekonomi, imigran, dan pendanaan keanggotaan Uni Eropa yang merugikan Inggris.

REFERENSI JURNAL

Azzahra, Nadia Fairuza, 2017, "*Alasan Masyarakat Inggris Memilih Keluar Dari Keanggotaan Uni Eropa Pada Referendum Tahun 2016*", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

³² BBC News. "Eight Reason Leave Won the UK's Referendum on the EU.", diakses dari : (<https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36574526>), pada tanggal 26 April 2024.

Bojang, 2018, “*The Study of Foreign Policy in International Relations*”. *Journal of Politican Sciences and Public*, vol.6 No.4, 2018.

Clark, Ken, Steppen Drinkwater, dan Catherine Robinson, 2014, “*Migration, Economic Crisis and Adjustment in the UK*”, iza Discussion Paper, No.8410.

Darwis, Danial dan Theyana Howay, 2021, “*Keluarnya Britania Raya dari keanggotaan Uni Eropa dan implikasinya bagi perekonomian*”, *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, vol.1 No.2.

Levy, Aslan, dan Birony, 2016, “*The Press and the Referendum campaign*,” *Dalam Eu Referendum Analysis 2016: Media, Voters, and the Campaign*, England The Centre for the Study of Journalism, Culture and Community. Bournemouth University.

Priangani, Ade, 2017, “*Efek Brexit terhadap Perekonomian Global*”, *Jurnal Westphalia*, Vol. 16 No.1, ISSN: 0853 – 2265.

Putra, I Dewa Gede Prastha Pratama dkk, “*Dampak Referendum Brexit Terhadap Kebijakan Imigran Uni Eropa Di Inggris*”.

Szczerbiak, Aleks and Paul Taggart. 2003. “*Theorising Party-Based Euroscepticism: Problem of Definition, Measurement and Causality*”, SEI Working Paper, No 69.

Tobing, Ledi Sanita, 2019, “*Hubungan Diplomasi Keamanan Inggris dan Uni Eropa (UE) Pasca Pernyataan Referendum British Exit Tahun 2016 -2017*”, *JOM FISIP*, Vol. 6.

BUKU

Hermann, Charles F. 1991. *Changing Course : When Government Choose to Redirect Foreign Policy*, Ohio International Studies Quaterly.

Jackson, Robert and Georg Sorensen. 2014. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Mas’oed, Mohtar. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*. PT. Pustaka LP3ES Indonesia : Jakarta.

DOKUMEN

European Parliament, 2018, “*The Labour Market Situation Recent in Impact Recent of Third Country Migrants*”.

Glennie, Alex dan Jennie Pennington, 2014, “*Europe, Free Movement and the UK – Charting a New Course*”, IPPR, London.

Gov.Uk, 2020, “*New immigration system: what you need to know*”.

HM Government, 2014, “*Review of the Balance of Competences between the United Kingdom and the European Union, Single Market: Free Movement of Persons*”, Crown, London.

HM Government, 2022, “*New Plan for Immigration: Legal Migration and order Control*” Strategy Statement.

Jonathan Wadsworth et al., 2016, “*Brexit and the Impact of Immigration on the UK*”, The london school of economics and political science.

Uberoi, Elise, 2016, “*European Union Referendum 2016*”, House of Commons Library.

WEBSITE

Acro Criminal Record Office, 2015, “*Annual Report 2014-2015*”, diakses dari : ([https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version\(1\).pdf](https://www.acro.police.uk/uploadedFiles/Annual%20Report%20A4%202014-15%20Final%20Version(1).pdf)), pada tanggal 25 April 2024.

BBC News. “*Eight Reason Leave Won the UK’s Referendum on the EU*”, diakses dari : (<https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36574526>), pada tanggal 26 April 2024.

Helm, Toby, 2016, “*British Eurosceptism: A Brief History*”, diakses dari : (<https://www.theguardian.com/politics/2016/feb/07/british-euroscepticism-a-brief-history>), pada tanggal 19 Juni 2024.

House of Commons, 2016, “*Migrantion Crisis*”, diakses dari : (<https://publications.parliament.uk/pa/cm201617/cmselect/cmhaff/24/2412.htm>), pada tanggal 11 April 2024

Mason, Stewart, and Asthana, 2016 “*Boris Johnson Insist Immigration Pledge is not Bid to Oust Cameron*” The Guardian, diakses dari : (<https://www.theguardian.com/politics/2016/jun/01/boris-johnson-insists-not-presenting-post-cameron-government-vote-leave>), pada tanggal 26 April 2024.

Office For National Statistics, “*Migration Statistics Quarterly Report : February 2016*”, diakses dari : (<https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationa>

[ndmigration/internationalmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/february2016#net-migration-to-the-uk](https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/internationalmigration/bulletins/migrationstatisticsquarterlyreport/february2016#net-migration-to-the-uk)), pada tanggal 27 Februari 2023.

Tim Ross, 2014, “*Revealed: Home Office Dossier on Abuse and Fraud By Eu Migrants*”, diakses dari : (<https://www.telegraph.co.uk/news/politics/conservative/10597409/Home-Office-hid-dossier-on-EU-migrants.html>), pada tanggal 26 April 2024.

UK. Parliament, 2021, “UK Visa and Immigration Policies for EU and EEA Citizens”, diakses dari : (<https://lordslibrary.parliament.uk/uk-visa-and-immigration-policies-for-eu-and-eea-citizens/>), pada tanggal 13 Januari 2024.

Visa Guide, “*UK Immigration Points Based System*”, diakses dari : (<https://visaguide.world/europe/uk-visa/point-based-system/>), pada tanggal 20 Februari 2023.